

# Berita Lingkungan Hidup

## Situ Cipondoh Masih Jadi Rebutan

### Pengembang perumahan tetap menguruk Situ Kayu Antap.

TANGERANG -- Kepemilikan Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, masih jadi perebutan dua daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. Badan Pengawasan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tangerang berharap keputusan kepemilikan atas Situ Cipondoh cepat terlaksana.

"Hingga kini, BPLH masih menunggu keputusan status pengelolaan Situ Cipondoh," ujar Kepala Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup BPLH kota Tangerang, Dadang, kepada *Republika*, Ahad (1/11).

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, status situ tersebut berada dalam naungan pemerintah pusat. Sedangkan apabila dilihat dari letaknya, Situ Cipondoh dengan luas 126,17 hektare (ha) ini, berada dalam naungan Pemerintah Provinsi Banten. Situ ini merupakan kawasan wisata yang cukup terkenal di Kota Tangerang.

Dadang mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah sejak lama mempersiapkan *master plan* atas pengelolaan Situ Cipondoh tersebut. Meskipun, putusan mengenai siapa yang berhak mengelolanya belum final. Menurutnya, BPLH sengaja meminta ketegasan karena apabila nantinya sudah ada ketetapan siapa yang menjadi pengurusnya, pihak Pemkot Tangerang akan mengusulkan pengelolaannya ditangani oleh pihak pemkot.

"Mengingat letak Situ Cipondoh yang berada di Kota Tangerang, maka situ ini bisa dimanfaatkan menjadi objek wisata di Kota Tangerang," papar Dadang.

Pembuatan *master plan* atas Situ Cipondoh ini, menurut Dadang, dilakukan BPLH dengan melibatkan instansi terkait. Di antaranya Dinas Tata Kota (DTK), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), serta Dinas Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporabudpar). "Bila jadi, situ ini nantinya akan dibuat sebagai sentra pariwisata Kota Tangerang dan bumi perkemahan," terang Dadang.

Di tempat lain, pengembang perumahan tetap menguruk Situ Kayu Antap, Ahad (1/11), untuk perluasan lahan perumahan kendati pejabat Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), HM Saleh, telah memperingatkan pemberhentian pengurukan situ tersebut.

Bahkan, menurut Ketua RW 05 Kelurahan Rempoa, Ciputat, Budi Wityarno (72), kepada *Republika*, proses pengurukan mendapat pengawalan sejumlah oknum polisi. "Sejak awal warga telah memprotes pengurukan tersebut. Selain itu, pemberhentian atas pengurukan ini juga telah dilakukan oleh pihak pemkot, tetapi pengembang perumahan tersebut masih saja melakukan pengurukan hingga saat ini," papar Budi.

Situ Kayu Antap, yang terletak di wilayah RT 06 dan RT 08 RW 02, Rempoa, Tangsel, tersebut seharusnya menjadi lahan konservasi air dan ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga sekitarnya. Namun, beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan pengembang perumahan dengan label PT Hanna Kreasi Persada membangun Beranda Townhouse di kawasan tersebut.

Pemerintah kota dan masyarakat setempat sudah berupaya menghentikan pengurukan terhadap Situ Kayu Antap sejak mulai dilakukan PT Hanna Kreasi Persada. Di antaranya, melakukan pengusutan mengenai legalitas sertifikat kepemilikan atas lahan Situ Kayu Antap tersebut, menyampaikan surat teguran dari Departemen Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor TH08.04/MN/74 yang berisikan larangan menyelenggarakan pemanfaatan lahan yang mengganggu bentang alam dan menyebabkan penurunan kualitas fisik dan debit air. Upaya lain, melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Banten dan perintah pemberhentian secara langsung sudah dilakukan. Akan tetapi, pengurukan atas situ tersebut tetap berjalan.

Dari pantauan *Republika*, sampai kini sekitar kawasan situ seluas 1,48 ha tersebut masih dikelilingi pagar beton kokoh setinggi sekitar tiga meter. Pagar itu menyatu dengan tembok pembatas kompleks perumahan mewah yang telah dibangun sebelumnya dan tepat berdampingan dengan Situ Kayu Antap.

Pagar tersebut juga dijaga oleh beberapa oknum ber-seragam polisi. Warga pun kesulitan memasuki, bahkan sekadar melihat dari dekat untuk melihat kawasan konservasi tersebut. C 16/ed:zaky